



PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DENDA PAJAK, DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN (BBNKB) TERHADAP PENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SUKABUMI

Puspita Septriana¹⁾

Puspitaseptriana523@gmail.com

Ade Sudarma²⁾

adesudarma@ummi.ac.id

Hendra Tanjung³⁾

hendratanjung515@ummi.ac.id

^{1) 2) 3)} Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor, denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah realisasi penerimaan PKB, Denda Pajak, BBNKB, dan PAD dari tahun 2020 - 2024 (data perbulan) sebanyak 60 sampel. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis secara parsial dan simultan serta uji koefesien determinan dengan Tingkat signifikansi 5% menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 28. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan, denda pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kemudian hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor, denda pajak, dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi tahun 2020-2024.

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract

This study aims to determine how motor vehicle tax revenue, tax penalties, and motor vehicle transfer fees affect the increase in Local Own-Source Revenue (PAD) in the city of Sukabumi from 2020 to 2024. This study employs a quantitative method with an associative approach. The sample consists of the actual realization of motor vehicle tax revenue, tax penalties, vehicle registration fees, and PAD from 2020 to 2024 (monthly data), totaling 60 samples. Data analysis was conducted using classical assumption tests, multiple linear regression analysis, partial and simultaneous hypothesis tests, and coefficient of determination tests at a 5% significance level using SPSS version 28 software. The results of the study indicate that motor vehicle tax revenue and vehicle registration transfer fees have a positive and significant partial effect on the increase in Local Government Revenue (PAD). Meanwhile, tax penalties do not significantly influence the increase in Local Government Revenue. Additionally, the simultaneous test results indicate that motor vehicle tax revenue, tax penalties, and motor vehicle registration fees significantly influence the increase in Local Government Revenue (PAD) in the City of Sukabumi from 2020 to 2024.

Keyword: motor vehicle tax, tax penalties, motor vehicle transfer fees, local revenue



PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu lebih dari dua puluh tahun pelaksanaan otonomi daerah, indikator kunci keberhasilan pembangunan regional adalah kemampuan pemerintah daerah mengelola keuangannya secara mandiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya berfungsi sebagai data statistik, melainkan representasi konkret dari kapasitas fiskal dan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan serta layanan publik, karena PAD sendiri merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi daerah tersebut.

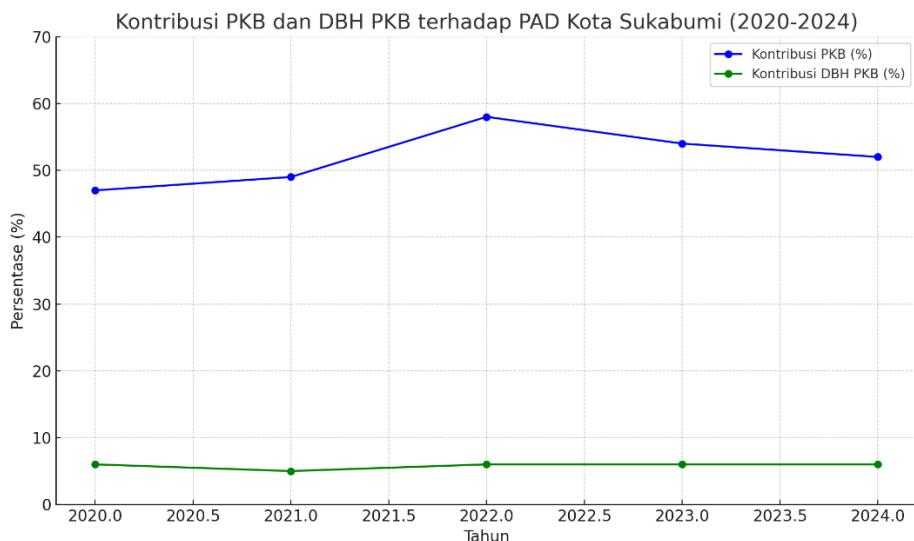
Implementasi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah paradigma pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Kebijakan desentralisasi ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari implementasi otonomi daerah adalah tuntutan kemandirian fiskal, dimana setiap daerah harus mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui sumber-sumber pendapatan yang dimilikinya. Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dan kemampuannya dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, sistem dana bagi hasil (DBH) pajak kendaraan bermotor merupakan bagian integral dari kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, DBH ini berasal dari pajak provinsi yang kemudian didistribusikan kepada kabupaten/kota menggunakan formula yang telah ditetapkan. Khusus di Jawa Barat, termasuk Kota Sukabumi, pembagian DBH Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. Aturan ini menjamin bahwa setiap kabupaten/kota akan menerima minimal 30% dari total penerimaan PKB. Pengelolaan penerimaan PKB yang efektif dan efisien sangat penting. Hal ini secara langsung memengaruhi kapasitas keuangan Pemerintah Kota Sukabumi untuk mendanai berbagai proyek pembangunan dan menyediakan layanan publik bagi masyarakatnya.

Tabel. 1

Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Kota Sukabumi





Sumber: data telah diolah penulis

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan pola kontribusi yang fluktuatif namun tetap dominan. Kontribusi PKB dimulai dari 47% pada tahun 2020, meningkat menjadi 49% pada tahun 2021, kemudian mencapai puncaknya 58% pada tahun 2022, sebelum mengalami penurunan bertahap menjadi 54% pada tahun 2023 dan 52% pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan adanya volatilitas dalam kontribusi PKB yang dapat mempengaruhi stabilitas penerimaan daerah. Rata-rata kontribusi PKB sebesar 52% selama periode penelitian mengkonfirmasi bahwa PKB merupakan tulang punggung penerimaan daerah Kota Sukabumi. Di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) PKB menunjukkan pola yang lebih stabil dengan kontribusi konsisten di kisaran 5-6% terhadap total PAD, mencerminkan mekanisme bagi hasil yang telah terstruktur sesuai dengan ketentuan minimal 30% yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Gambar. 1
Persentase Kendaraan Menunggak



Sumber: UPTD PPPDW Kota Sukabumi, data telah diolah penulis

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi pemungutan PKB menghadapi kendala signifikan. Seperti, peningkatan jumlah kendaraan bermotor rata-rata 12% per tahun, namun tingkat tunggakan pajak juga meningkat dari 19,22% (24.840 kendaraan) pada 2020 menjadi 25,48% (31.275 kendaraan) pada 2024. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang hanya berkisar 70%, jauh dari target 90%, menunjukkan bahwa potensi pendapatan belum sepenuhnya dioptimalkan (Syafitri *et al.*, 2024).

Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara perpajakan kendaraan bermotor dan PAD menunjukkan hasil yang beragam dan terkadang inkonsisten. Irfandy *et al.*, (2022) menemukan bahwa PKB dan BBNKB kurang berkontribusi terhadap peningkatan PAD di Provinsi Kalimantan Timur, sementara Safitri (2021) menyatakan kontribusi yang cukup baik di Provinsi Jawa Timur. Hanifah *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa BBNKB berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Sukabumi, namun Jayanti & Wirananda (2025) menemukan sebaliknya di Kabupaten Deli Serdang. Inkonsistensi temuan ini mengindikasikan perlunya eksplorasi lebih lanjut dengan menggunakan data terbaru dan analisis yang lebih komprehensif, terutama dalam menganalisis peran denda pajak sebagai variabel terpisah yang belum banyak diteliti secara spesifik dalam konteks penerimaan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi periode 2020-2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur keuangan daerah, khususnya dalam memahami dinamika penerimaan dari sektor perpajakan kendaraan bermotor. Secara praktis, hasil

penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah Kota Sukabumi dalam merumuskan strategi optimalisasi PAD yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi era digitalisasi administrasi pemerintahan dan implementasi kebijakan perpajakan terbaru. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis tetapi juga nilai aplikatif yang dapat mendukung tercapainya otonomi daerah yang berkelanjutan dan efektif.

LANDASAN TEORI

Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal oleh Bird (2000) didefinisikan sebagai: (1) pelepasan tanggungjawab yang berada dalam lingkungan Pempus ke instansi vertikal di daerah atau ke Pemda; (2) pendeklegasian suatu situasi di mana daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah; (3) Pelimpahan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah (Gedeona, n.d.).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah digunakan untuk membangun daerah itu sendiri, salah satu upaya dalam membangun daerah adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Karena pada dasarnya, sebagian besar pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah suatu daerah (Kurniawan, n.d.).

Pajak Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya yang akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Thian, 2022).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut

PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan (PERDA NO. 9 TAHUN 2023). Berdasarkan Permendagri No 8 Tahun 2024 Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor

Denda Pajak

Denda pajak kendaraan bermotor adalah jumlah tambahan yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor kepada pemerintah apabila terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Denda ini berfungsi sebagai sanksi atau hukuman atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Nisa et al., 2024).

Besaran denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) seseorang ditentukan oleh jumlah PKB, durasi penundaan, dan bunga yang timbul atas jumlah yang telah jatoh tempo. Selain itu, ada juga pungutan wajib berupa Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang diawasi oleh Jasa Raharja. Nilai SWDKLLJ ini tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan bervariasi berdasarkan jenis kendaraan yang dimiliki. Menurut ketentuan dari Jasa Raharja, denda SWDKLLJ adalah sebesar Rp. 32.000 untuk sepeda motor dan Rp. 100.000 untuk mobil (Nanda & Ferdian, 2024).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (9).

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

PKB sebagai pajak tahunan yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang stabil dan berkelanjutan terhadap PAD. Semakin banyak kendaraan bermotor yang terdaftar, semakin besar pula penerimaan PKB yang berkontribusi pada realisasi PAD (Jayanti & Wirananda, 2025). Penelitian

yang dilakukan oleh W Ananda & Idris, (2023) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- **H1: PKB berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kota Sukabumi.**

Pengaruh Denda Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Denda pajak sebagai sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PKB juga memberikan kontribusi terhadap PAD. pendapatan suatu daerah dari denda pajak kendaraan bermotor juga memberikan pengaruh dalam peningkatan pendapatan asli daerah, hal ini dikarenakan denda pajak kendaraan bermotor merupakan jumlah tambahan yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor kepada pemerintah apabila terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu (Nisa *et al.*, 2024). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nisa, Razif, Nurhasanah, dan Arliansyah (2024) denda pajak kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- **H2: Denda Pajak berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kota Sukabumi.**
- #### **Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ialah biaya yang wajib dibayar saat kepemilikan kendaraan bermotor pindah tangan, baik lewat jual beli, hibah, warisan atau cara lainnya. Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) efektif untuk dilakukan dan memberi dampak yang positif untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Manangin *et al.*, 2023). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Neli Hanifah, Risma Nurmilah, Hendra Tanjung (2023) bahwa Bea balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari penjelasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- **H3 : BBNKB berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kota Sukabumi.**
- #### **Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa, Razif, Nurhasanah, dan Arliansyah (2024) Pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti & Wirananda (2025) menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H4 : Penerimaan PKB, Denda Pajak, dan BBNKB secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kota Sukabumi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pendapatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder, dengan teknik dokumentasi dan studi literatur. Sampel penelitian berjumlah 60 data bulanan, diambil dari bulan Januari 2020 hingga bulan Desember 2024, menggunakan metode sampling jenuh. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis secara parsial dan simultan serta uji koefesien determinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data yang diambil dari suatu populasi mengikuti distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi yang simetris, di mana sebagian besar nilai terletak dekat dengan rata-rata, dan frekuensi nilai berkurang secara bertahap saat nilai menjauh dari rata-rata. Pengujian normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika $\text{sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal
- Jika $\text{sig} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 28 hasil yang didapatkan sebagai berikut:



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07254210
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.052
	Negative	-.074
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.663
	99% Confidence Interval	Lower Bound Upper Bound
		.651 .675

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1314643744.

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai statistik uji sebesar 0,74 dengan nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,200. Dengan menggunakan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi (0,200) lebih besar dari α (0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis nol (H_0) yang menyatakan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tujuan utama dari melakukan uji multikolinearitas adalah untuk memastikan bahwa variabel independen dalam model regresi tidak saling memengaruhi dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Uji multikolinearitas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan patokan nilai VIF (Variance Inflation Factor), kriteria yang digunakan adalah:

- Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas.
- Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 28 hasil yang didapatkan sebagai berikut:

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.		
	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	-1.835	.219		-8.394	<.001		
	PKB	.260	.030	.253	8.799	<.001	.218 4.592	
	DENDA_PAJAK	-.050	.031	-.040	-1.636	.108	.302 3.312	
	BBNKB	.975	.043	.798	22.868	<.001	.148 6.745	

a. Dependent Variable: PAD

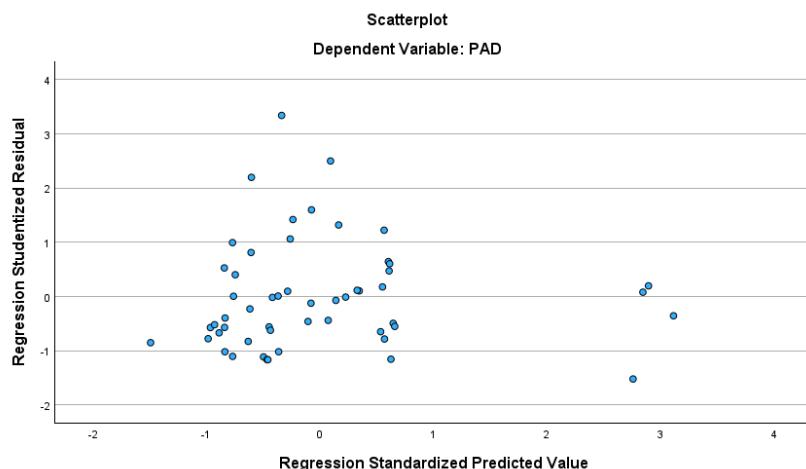
Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10,00. Nilai Tolerance untuk PKB (0,218),



Denda Pajak (0,302), dan BBNKB (0,148), sedangkan nilai VIF masing-masing adalah 4.592; 3.312; dan 6.745. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians error atau residual tidak konstan (heteroskedastisitas) atau konstan (homoskedastisitas) pada setiap pengamatan. Adapun data penelitian ini dilakukan pengujian menggunakan SPSS 28 ditemukan hasil sebagai berikut:



Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, teramatinya bahwa titik-titik data tersebar secara acak di sekitar angka 0 pada sumbu Y, baik di atas maupun di bawahnya. Sebaran ini tidak membentuk pola spesifik seperti kerucut atau gelombang, yang mengindikasikan bahwa varians residual bersifat konstan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini, dan asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi.

Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menentukan apakah ada korelasi antara *error* (residual) pada periode t dengan *error* pada periode t-1 dalam model regresi. Dalam penelitian ini, uji Durbin-Watson digunakan untuk mendeteksi autokorelasi. Uji ini umumnya diterapkan pada data *time series* atau data runtut waktu. Hasil perhitungan dari SPSS versi 28 adalah sebagai berikut:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.996 ^a	.991	.991	.07473	1.680

a. Predictors: (Constant), BBNKB, DENDA_PAJAK, PKB

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel di atas, uji autokorelasi Durbin-Watson menghasilkan nilai 1.680. Dengan jumlah sampel akhir (N) sebanyak 53 dan jumlah prediktor (K) sebanyak 3, diperoleh nilai $dL=1.4402$, $dU=1.6785$, dan $4-dU=2.3215$. Syarat untuk tidak terjadinya autokorelasi adalah $dU < DW < 4-dU$. Karena nilai Durbin-Watson (1.680) berada di antara dU (1.6785) dan $4-dU$ (2.3215), atau dengan kata lain $1.6785 < 1.680 < 2.3215$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model, dan asumsi autokorelasi telah terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS versi 28, diperoleh output coefficients yang menunjukkan nilai koefisien regresi untuk setiap variabel independen terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil analisis menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut:

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	-1.835	.219	-8.394	<.001
	PKB	.260	.030	.253	8.799
	DENDA_PAJAK	-.050	.031	-.040	-1.636
	BBNK	.975	.043	.798	22.868

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan regresi linear berganda diperoleh untuk variabel $X_1 = 0.260$, variabel $X_2 = -0.050$ dan variabel $X_3 = 0.975$ dengan konstanta -1.835. sehingga diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$PAD = -1.835 + 0.260X_1 - 0.050X_2 + 0.975X_3 + e$$

Uji Hipotesis

Uji Parsial (uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian adalah jika nilai Sig. < 0.05, maka variabel independen berpengaruh signifikan. Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS versi 28 didapat hasil sebagai berikut:

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	-1.835	.219	-8.394	<.001
	PKB	.260	.030	.253	8.799
	DENDA_PAJAK	-.050	.031	-.040	-1.636
	BBNK	.975	.043	.798	22.868

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan data tabel perhitungan diatas didapatkan:

1. Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil t hitung variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada taraf kesalahan 0,05 dan df= (n-k-1) df= 53-3-1= 49. Diperoleh nilai t tabel sebesar 2.009575, sehingga t hitung $8.799 > 2.009575$ (t tabel) dan nilai Sig. PKB adalah <0.001 . Karena nilai Sig. $0.001 < 0.05$ maka hipotesis diterima, ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pada PKB akan meningkatkan PAD. Maka, dapat disimpulkan bahwa PKB berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Denda Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil t hitung variabel denda pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -1.636. Pada taraf kesalahan 5% atau 0,05 dan df= (n-k-1) df= 53-3-1= 49. Diperoleh nilai t tabel sebesar 2.009575, sehingga t hitung $-1.636 < 2.009575$ (t tabel) dan nilai signifikansi (p-value) untuk denda pajak adalah 0.108. Karena nilai Sig. $0.108 > 0.05$ Maka hipotesis ditolak, ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pada denda pajak akan menurunkan PAD. Dapat disimpulkan bahwa Denda Pajak tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil t hitung variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 22.868. Pada taraf kesalahan 5% atau 0,05 dan df= (n-k-1) df= 53-3-1= 49. Diperoleh nilai t tabel sebesar 2.009575, sehingga t hitung $22.868 > 2.009575$ (t tabel) dan nilai Sig. untuk variabel BBNKB adalah <0.001 . Karena nilai Sig. $0.001 < 0.05$ maka hipotesis diterima, ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pada BBNKB akan meningkatkan PAD. Maka, dapat disimpulkan bahwa BBNKB berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Uji Simultan

Uji signifikansi simultan atau Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang digunakan dalam model penelitian PKB, Denda Pajak, dan BBNKB secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (PAD). Adapun hasil dari uji F dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30.674	3	10.225	1830.916	<.001 ^b
	Residual	.274	49	.006		
	Total	30.948	52			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), BBNKB, DENDA_PAJAK, PKB

Dari data perhitungan pada tabel, nilai F hitung untuk pengaruh gabungan variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Denda Pajak (X2), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah 1830.916. Dengan derajat kebebasan $df_1=3$ dan $df_2=49$ pada tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai F tabel sebesar 2.793949. Karena F hitung $1830.916 > F$ tabel 2.793949, dan nilai signifikansi (Sig.) $0.001 < 0.05$, maka hipotesis diterima. Ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi PAD.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.996 ^a	.991	.991	.07473

a. Predictors: (Constant), BBNKB, DENDA_PAJAK, PKB

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier yang sangat kuat antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Denda Pajak, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dibuktikan oleh Koefisien Korelasi Ganda (R) sebesar 0.996. Model regresi ini sangat efektif, mampu menjelaskan 99.1% dari variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui gabungan variabel-variabel tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai R-squared dan Adjusted R-squared sebesar 0.991. Akurasi prediksi model ini juga tinggi, dengan rata-rata kesalahan prediksi PAD hanya sekitar 0.07473, ditunjukkan oleh nilai Standard Error of the Estimate. Singkatnya, pajak dan denda terkait kendaraan memiliki pengaruh signifikan dan dapat memprediksi PAD dengan sangat baik.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Melalui uji hipotesis parsial (uji t), nilai t hitung untuk variabel PKB ditemukan sebesar 8,799. Angka ini jauh melampaui nilai t tabel yang ditetapkan sebesar 2,009575. Nilai t tabel ini dihitung berdasarkan taraf kesalahan 5% (atau 0,05) dan derajat kebebasan (df) sebesar 49 (yang berasal dari 53 observasi dikurangi 3 variabel dan 1 konstanta). Selain itu, nilai signifikansi (Sig.) untuk PKB tercatat kurang dari 0,001. Angka ini jauh lebih kecil dari ambang batas signifikansi 0,05. Kombinasi kedua hasil ini t hitung yang lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi yang sangat rendah menjadi bukti kuat untuk menerima hipotesis bahwa PKB memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Ini berarti bahwa setiap peningkatan dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara statistik dan substansial meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKB merupakan salah satu faktor utama yang secara signifikan berkontribusi pada penerimaan PAD.

2. Pengaruh Denda Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Melalui uji hipotesis parsial (uji t), didapatkan nilai t hitung untuk variabel denda pajak sebesar -1,636. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan t tabel yang menjadi batas penentuan signifikansi. Dengan tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5% ($\alpha=0,05$) dan derajat kebebasan (df) sebesar 49 (diperoleh dari 53 total observasi dikurangi 3 variabel dan 1 konstanta), nilai t tabel yang diperoleh adalah 2,009575. Perbandingan antara kedua nilai ini sangat penting. Ditemukan bahwa nilai t hitung (-1,636) lebih kecil dari nilai t tabel (2,009575). Selain itu, nilai signifikansi (p-value) untuk denda pajak adalah 0,108, yang mana lebih besar dari ambang batas 0,05. Kedua indikator ini secara konsisten menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan denda pajak berpengaruh signifikan terhadap PAD harus ditolak. Ini berarti, berdasarkan temuan yang ada, peningkatan atau penurunan denda pajak secara statistik tidak memengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, denda pajak, dalam konteks penelitian ini, bukanlah faktor pendorong utama yang signifikan terhadap fluktuasi PAD.

3. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Melalui uji hipotesis parsial (uji t), nilai t hitung untuk variabel BBNKB ditemukan sebesar 22,868. Angka ini jauh melebihi t tabel yang ditetapkan sebesar 2,009575. Nilai t tabel ini diperoleh dengan taraf kesalahan 5% (atau 0,05) dan derajat kebebasan (df) sebesar 49 (dari 53 observasi dikurangi 3 variabel dan 1 konstanta). Selain itu, nilai signifikansi (Sig.) untuk BBNKB tercatat kurang dari 0,001, yang jauh lebih kecil dari ambang batas 0,05. Kombinasi t hitung yang jauh melampaui t tabel dan nilai signifikansi yang sangat rendah menjadi bukti kuat untuk menerima hipotesis bahwa BBNKB memiliki pengaruh signifikan terhadap

PAD. Ini berarti bahwa setiap peningkatan dalam penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan secara substansial meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BBNKB merupakan salah satu komponen utama yang secara signifikan berkontribusi pada pendapatan daerah.

4. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Melalui uji hipotesis simultan (uji F), nilai F hitung yang didapat untuk model ini mencapai 1830,916. Angka ini jauh melampaui F tabel yang ditetapkan sebesar 2,793949. F tabel ini diperoleh dengan derajat kebebasan $df_1=3$ (jumlah variabel independen) dan $df_2=49$ (derajat kebebasan residual), serta pada taraf signifikansi 5%. Selain itu, tingkat signifikansi (*p*-value) yang dihasilkan menunjukkan angka kurang dari 0,001, yang mana jauh lebih kecil dari ambang batas 0,05. Kombinasi F hitung yang jauh lebih besar dari F tabel dan tingkat signifikansi yang sangat rendah ini menjadi bukti kuat untuk menerima hipotesis penelitian. Ini artinya, ketiga variabel independen—Pajak Kendaraan Bermotor, denda pajak, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor—secara bersama-sama memberikan dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontribusi kolektif dari sumber-sumber pendapatan ini sangat krusial dalam membentuk total PAD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi pengaruh dari ketiga komponen pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi. Secara individual, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD, membuktikan bahwa PKB merupakan sumber pendapatan yang dapat diandalkan dan konsisten bagi daerah. Setiap peningkatan penerimaan PKB akan memberikan kontribusi langsung terhadap kenaikan PAD Kota Sukabumi.

Berbeda dengan PKB, denda pajak justru menunjukkan hasil yang tidak signifikan dalam mempengaruhi PAD secara parsial. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun denda pajak merupakan bagian dari penerimaan daerah, kontribusinya terhadap total PAD masih relatif kecil dan belum memberikan dampak yang berarti. Kondisi ini dapat mengisyaratkan dua kemungkinan, yaitu instrumen denda pajak belum dioptimalkan secara maksimal sebagai sumber peningkatan PAD atau tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran tepat waktu sudah cukup baik sehingga denda yang dikenakan tidak terlalu besar.

Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, yang menandakan bahwa aktivitas

perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Sukabumi memberikan kontribusi substansial terhadap penerimaan daerah. BBNKB terbukti menjadi sumber pendapatan yang memiliki potensi besar mengingat dinamika kepemilikan kendaraan yang terus berkembang di wilayah tersebut.

Menariknya, ketika ketiga variabel tersebut dianalisis secara simultan atau bersama-sama, hasilnya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Sukabumi. Meskipun denda pajak secara individual tidak memberikan pengaruh yang signifikan, namun ketika dikombinasikan dengan PKB dan BBNKB, ketiga komponen ini secara kolektif mampu memberikan kontribusi yang bermakna terhadap peningkatan penerimaan daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan pengelolaan yang terintegrasi dan komprehensif terhadap ketiga komponen pajak daerah tersebut untuk dapat mengoptimalkan penerimaan PAD Kota Sukabumi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gedeona, H. T. (n.d.). *DESENTRALISASI FISKAL: KAJIAN PERBANDINGAN KETIDAKSEIMBANGAN FISKAL VERTIKAL DI INDONESIA DAN JEPANG*.
- Hanifah, N., Nurmilah, R., & Tanjung, H. (2023). PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH (PPPDW) KOTA SUKABUMI. *AKUNTOTEKNOLOGI*, 15(2), 48–60. <https://doi.org/10.31253/aktek.v15i2.2247>
- Irfandy, M. R., Latif, I. N., & Masitoh H, R. (2022). *KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH*.
- Jayanti, S., & Wirananda, H. A. (2025). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal EMT KITA*, 9(1), 298–306. <https://doi.org/10.35870/emt.v9i1.3569>
- Kurniawan, A. (n.d.). *Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja terhadap Peningkatan Ekonomi Lokal*. Penerbit Adab.
- Manangin, Y. A. M., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2023). ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) (STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PPD KOTAMOBAGU). *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(1), 1160–1170. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.47165>
- Nanda, A. M., & Ferdian, A. (2024, September 18). *Hitung Denda Pajak Motor yang Telat Bayar*. <https://otomotif.kompas.com/read/2024/09/18/152100615/hitung-denda-pajak-motor-yang-telat-bayar>
- Nisa, M., Razif, Nurhasanah, & Arliansyah. (2024). ANALISIS PENGARUH PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA

KENDARAAN BERMOTOR, DAN PEMUNGUTAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE PADA TAHUN 2018-2022. 3(3).

PERDA_NO_9_TAHUN_2023_TTG_PAJAK_DAERAH_DAN_RETRIBUSI_DAERAH.pdf. (n.d.). Retrieved May 14, 2025, from https://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2024/07/PERDA_NO_9_TAHUN_2023_TTG_PAJAK_DAERAH_DAN_RETRIBUSI_DAERAH.pdf

Permendagri No 8 Tahun 2024_OCR.pdf. (n.d.).

Safitri, D. N. (2021). Kontribusi Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19). *SUSTAINABLE*, 1(1), 144. <https://doi.org/10.30651/stb.v1i1.9762>

Syafitri, F. S., Sudarma, A., & Himawan, I. S. (2024). *Pengaruh Pembebasan BBNKB, Tingkat Pendapatan Dan Program Pemutihan PKB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Di Kota Sukabumi)*. 16(2).

Thian, A. (2022). *Perpajakan* 1. Penerbit Andi.

UNDANG. (n.d.). Retrieved April 26, 2025, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fdd9b558-f232-4b63-a74b-285d21d33681/28TAHUN2009UU.HTM>

UU Nomor 1 Tahun 2022.pdf. (n.d.).

W Ananda, S. M., & Idris, A. S. (2023). PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI LAMPUNG. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 4(2). <https://doi.org/10.57084/jata.v4i2.1162>

